**DINAMIKA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMAN 4 SIDOARJO**

**Cahyaning Sukmawati**

Program studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

cahyaningsukmawati@unesa.ac.id

**Dr. Ari Wahyudi, M.Si.**

Program studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

ariwahyudi@unesa.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika penyelenggaraan pendidikan inklusif dan mengidentifikasi bentuk disfungsi, fungsi manifes-laten, serta bentuk inovasi yang dilakukan oleh para penyelenggara dalam melaksanakan pendidikan inklusif di SMAN 4 Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teori taraf menengah Robert K. Merton dan bentuk adaptasi dalam teori perilaku menyimpang Merton. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualtitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dinamika penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMAN 4 Sidoarjo, yang terlihat dari beberapa perubahan pada aspek sekolah dari awal penyelenggaraan hingga berjalan sampai saat ini. Salah satunya adalah bertambahnya organisasi sekolah yang khusus menangani masalah inklusi. Dinamika yang terjadi ini menggiring pada fenomena lain yakni adanya disfungsi, fungsi manifes-laten yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMAN 4 Sidoarjo. Sedangkan untuk inovasi yang dijumpai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah inovasi dalam proses penerimaan siswa difabel, inovasi dalam pemberian nilai siswa difabel, dan inovasi dalam proses KBM di kelas.

**Kata Kunci :** *Dinamika, Pendidikan Inklusif, Disfungsi, Fungsi manifes-laten, Inovasi*

**Abstract**

This study aims to describe the dynamics of the implementation of inclusive education and identify forms of dysfunction, manifest-latent, and forms of innovation carried out by organizers in implementing inclusive education at SMAN 4 Sidoarjo. This study uses the middle level theory of Robert K. Merton and the form of adaptation found in Merton's theory of deviant behavior. The method used in this study is qualitative descriptive. The results of this study indicate the dynamics of the implementation of inclusive education at SMAN 4 Sidoarjo, which can be seen from a number of changes in the aspects of the school from the beginning of the implementation to the present. One of them is the increasing number of school organizations that specifically deal with inclusion issues. This dynamic leads to other phenomena, namely the presence of dysfunction, manifest function-latent found in the implementation of inclusive education at SMAN 4 Sidoarjo. Whereas for innovation found in the implementation of inclusive education is innovation in the process of diffable student acceptance, innovation in the value of students with disabilities, and innovation in the teaching and learning process in the classroom.

**Keywords:** *Dynamics, Inclusive Education, Dysfunction, manifest-latent functions, innovation*

**PENDAHULUAN**

Pengklasifikasian maju tidaknya suatu negara salah satunya dapat diukur melalui pendidikan. Pendidikan tetap dianggap sebagai fondasi bagi terbentuknya SDM yang berkualitas, meskipun tidak menjadi satu-satunya indikator yang menentukan maju atau berkembangnya suatu negara. Pendidikan dalam dunia internasional, diatur dalam Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 yang membahas mengenai pendidikan sebagai hak untuk seluruh anak.

Pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara, juga telah tercantum secara implisit dalam pembukaan UUD 1945. Pada pasal 5 ayat 1-5 dalam UU No 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak yang sama untuk meperoleh pendidikan, begitu juga bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus berhak untuk memperoleh pendidikan khusus (UU No. 2, 2003).

Keberadaan pendidikan khusus untuk kelompok berkebutuhan khusus telah dibahas dalam beberapa deklarasi dunia yang dihadiri oleh para praktisi pendidikan luar biasa, diantaranya adalah deklarasi universal (1948), Konvensi PBB (1989), deklarasi jomtien di Thailand (1990), deklarasi salamanca di Spanyol (1994), dan kerangka aksi dakkar (2000). (Kompendium, edisi ketiga).

Pada dasarnya sistem pendidikan yang telah menjadi sorotan dalam dunia internasional ini, merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi *gap* atau kesenjangan antara orang difabel dan non-difabel. Pendidikan inklusif merupakan kebalikan dari pendidikan segregatif atau pendidikan yang memisahkan antara siswa difabel dan non-difabel.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mencoba menyelenggarakan pendidikan inklusif pada tahun 80-an. Pendidikan tersebut dinamakan dengan pendidikan integratif dimana sekolah hanya sebatas mengintegrasikan siswa tunanetra dengan siswa non-difabel di sekolah reguler. Namun pendidikan tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena ketidaksiapan sarana dan prasarana yang memadai (Alfian, 2013: 69). Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sendiri secara jelas diatur dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan kecerdasan dan bakat istimewa. (Permendiknas No.70, 2009)

Pelaksanaan pendidikan inklusif yang mulai terlihat pada beberapa sekolah reguler yang terdapat di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Sidoarjo. Pada kenyataannya justru masih menunjukkan beberapa hal yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan hakikat dari pendidikan inklusif itu sendiri.

Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo sebagai salah satu sekolah sekolah inklusi di Sidoarjo. Adanya dinamika yang terjadi itulah yang nantinya menggiring pada fenomena lain yang disebut Merton sebagai disfungsi, fungsi manifes dan laten, serta inovasi yang dilakukan oleh para penyelenggara dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori taraf menengah Robert K. Merton. Penelitian yang membahas mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terdapat di kabupaten Sidoarjo ini, dilakukan disalah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Sidoarjo yang telah menerapkan sistem pendidikan inklusif sejak tahun 2013 dan telah disebut sebagai sekolah inklusi yakni SMAN 4 Sidoarjo. Subjek dari penelitian kali ini adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah tersebut, diantaranya kepala sekolah, guru mapel, guru pendamping khusus, siswa difabel dan siswa non-difabel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi yang telah dilakukan kurang lebih selama satu bulan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan subjek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan Teori taraf menengah Robert K. Merton sebagai pisau analisis.

**PEMBAHASAN**

1. **Dinamika Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif**

Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo berawal dari penunjukkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, yang tidak menutup kemungkinan adanya pergerakan dan perubahan yang mengiringi pelaksanaan sistem tersebut. Pergerakan dan perubahan inilah yang kemudian disebut dengan dinamika, yang menunjukkan adanya perbedaan antara pendidikan inklusif di awal penyelenggaraan hingga penyelenggaraan yang berjalan saat ini.

Penunjukkan yang dilakukan oleh pihak dikpendis kab. Sidoarjo secara tidak langsung mengarah pada upaya pembentukan tim inklusi sekolah, perekrutan GPK, dan pelatihan untuk pendidik yang menjadi tombak utama dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

1. **Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik mengenai Pendidikan Khusus**

Minimnya pengetahuan dan pengalaman para pendidik di SMAN 4 Sidoarjo mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif, menjadikan pemerintah harus meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus yang diwujudkan melalui pelatihan mengenai pendidikan khusus. Pada satu sisi pelatihan ini menunjukkan merupakan kegiatan yang fungsional karena bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik

Pelatihan yang dilaksanakan di SMAN 4 Sidoarjo lebih mengarah pada sosialisasi tentang definisi pendidikan khusus dan anak berkebutuhan khusus, tanpa membahas mengenai metode yang dapat digunakan oleh pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Banyak para pendidik di SMAN 4 Sidoarjo yang tidak mendapatkan solusi atas pertanyaan mengenai pendidikan inklusif dari pelaksanaan pelatihan tersebut. Namun penunjukkan ini justru disfungsional ketika kegiatan tersebut dianggap tidak memberikan solusi apapun mengenai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan inklusif nantinya. Diantaranya adalah ketidakjelasan dalam penentuan metode pembelajaran, dan pembuatan perangkat pembelajaran khusus untuk siswa difabel

1. **Pemahaman mengenai Sekolah Inklusi dan Tujuan Pendidikan Inklusif**

Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa difabel, dan mewujudkan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta tidak diskriminatif dengan mengintegrasikan siswa difabel dan non difabel dalam satu lingkungan belajar. Tujuan ini memiliki kesamaan dengan perspektif yang dilontarkan oleh para penyelenggara pendidikan inklusif di SMAN 4 Sidoarjo.

Namun di sisi lain pengintegrasian siswa difabel dan siswa non difabel justru disfungsional karena masih banyak pendidik yang belum mampu memahami kondisi siswa difabel, baik keterbatasan maupun kemampuan yang dimiliki siswa. Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo justru dianggap menyulitkan pihak pendidik karena harus membuat perangkat pembelajaran khusus

1. **Mekanisme Pembentukan Tim Inklusi Sekolah**

Tim inklusi pertama di SMAN 4 Sidoarjo dibentuk pada tahun 2013 oleh Bapak Majid selaku kepala sekolah yang menjabat saat itu. Pembentukan tim inklusi dan penunjukkan koordintaor tim inklusi diakui oleh beberapa pihak tidak memiliki dasar atau patokan yang kuat.

Tidak adanya kejelasan persyaratan yang digunakan oleh kepala sekolah dalam pembentukan tim inklusi pada kenyataannya masih bersambung hingga saat ini. Koordinator inklusi yang menjabat pada tahun ini juga mengaku tidak mengetahui alasan dan persyaratan yang digunakan oleh kepala sekolah, dalam menunjuk koordinator dan membentuk tim inklusi.

Sebenarnya pembentukan Tim Inklusi di sekolah ini dianggap fungsional karena telah menjalankan kewajiban dengan menyediakan tenaga kependidikan yang bertanggung jawab pada siswa difabel di sekolah. Tetapi di sisi lain pembentukan tersebut justru disfungsional karena minimnya pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kependidikan mengenai pendidikan khusus.

1. **Mekanisme Penerimaan dan Peran GPK di Sekolah Inklusi**

Penerimaan GPK yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo merupakan tanggung jawab tim inklusi dan kepala sekolah, dengan melihat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap calon GPK melalui proses wawancara. Pada satu sisi keberadaan GPK dapat fungsional karena membantu dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan mendampingi siswa difabel dan menyampaikan kemampuan siswa difabel dalam memahami materi pelajaran kepada guru mapel.

Sedangkan di sisi lain keberadaan GPK justru disfungsional karena jumlahnya yang terbatas dan pendampingan harus dilakukan dengan sistem rolling. Sehingga masih memunculkan keluhan dari beberapa siswa difabel yang mengaku kesulitan ketika tidak didampingi.

1. **Mekanisme Penerimaan Siswa Difabel**

Penerimaan siswa pada awal penyelenggaraan dapat fungsional bagi tim inklusi, karena dianggap telah menjalankan tugas sebagai penanggung jawab pendidikan inklusif di sekolah melalui upayanya dengan menerima siswa difabel. Penerimaan tersebut dianggap telah sebagai upaya awal untuk merangkul siswa difabel agar dapat bersosialisasi dengan siswa non difabel di sekolah inklusi. Namun penerimaan tersebut juga disfungsional bagi guru mapel karena tidak sesuainya kategori siswa yang diterima dengan kesiapan sekolah seperti yang tertulis dalam peraturan perundangan.

Penerimaan tersebut memiliki fungsi yang nampak sebagai upaya sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menerima siswa difabel, agar tujuan dari pendidikan inklusif dapat terwujud di SMAN 4 Sidoarjo. Namun penerimaan tersebut juga memiliki fungsi tersembunyi yang justru membuka jalan bagi orang tua untuk mendaftarkan siswanya yang memiliki kebutuhan khusus atau tidak melalui jalur inklusi ke SMAN 4 Sidoarjo, karena belum adanya mekanisme penerimaan yang jelas dan tegas oleh tim inklusi sekolah.

1. **Distribusi Siswa Difabel pada Setiap kelas**

Pengalokasian siswa difabel ke dalam setiap kelas dalam satu agkatan, ditentukan berdasarkan hasil assessment dan surat psikologi yang dilampirkan saat PPDB. Koordinator tim inklusi yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo mengaku menggunakan aturan yang tertulis dalam PPDB sebagai patokan dalam menentukan jumlah siswa difabel pada setiap kelas, yakni max. lima siswa dalam satu rombel. Namun di SMAN 4 Sidoarjo masih terdapat dua kelas yag terdiri dari tiga hingga empat siswa difabel di dalamnya, dengan jenis ketunaan yang sama.

Sebenarnya pengalokasian siswa difabel dalam setiap kelas di SMAN 4 Sidoarjo telah fungsional bagi pengurus tim inklusi karena telah dilakukan sesuai dengan assessment, keterbatasan, dan kemampuan siswa difabel. Namun di sisi lain justru disfungsional karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur, yang nantinya dapat lebih menyulitkan guru mapel dan siswa non difabel dalam proses pembelajaran.

1. **Keberadaan Sarana dan Prasarana Penunjang**

Keterbatasan dan hambatan yang dimiliki oleh setiap siswa difabel secara tidak langsung mengharuskan pihak sekolah memberikan tunjangan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan siswa difabel. Keberadaan sarana dan prasarana penunjang di sekolah inklusi sangat menentukan proses pembelajaran siswa difabel di sekolah, seperti halnya yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo.

Sarana dan prasarana penunjang yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo dapat dikatakan sangat terbatas, mulai dari tidak adanya tangga khusus untuk siswa yang duduk di kursi roda, kamar mandi khusus, serta lantai yang dibuat berbeda untuk siswa tunanetra. Sedangkan di SMAN 4 Sidoarjo memiliki satu siswa tunadaksa yang duduk di kursi roda, dan dua siswa tunanetra.

SMAN 4 Sidoarjo yang mengaku telah menjadi sekolah inklusi di Kab. Sidaorjo hanya memiliki satu ruang khusus untuk tempat pengembangan keterampilan siswa difabel ataupun pemberian layanan khusus oleh GPK. Sedangkan untuk siswa tunanetra ditunjang oleh laptop yang dilengkapi dengan aplikasi khusus yang bernama Jaws, yang dapat mengubah tulisan menjadi suara

1. **Keberadaan Visi Misi dan Kurikulum atau Perangkat Pembelajaran Khusus**

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SMAN 4 Sidoarjo tidak hanya mempengaruhi kebijakan sekolah dalam membuat perangkat pembelajaran yang berbeda, melainkan juga kebijakan pada visi dan misi sekolah. Sebelum penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMAN 4 Sidoarjo, adanya perubahan visi dan misi diakui oleh Tim pengembang sekolah selalu dilakukan secara rutin dalam lima tahun sekali. Perubahan visi misi oleh Tim pengembang sekolah dilakukan atas dasar pertimbangan adanya perubahan dari pihak-pihak sekolah, yang harus melaksanakan program yang berbeda setiap lima tahun sekali.

Keberadaan siswa difabel yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo dengan segala keterbatasan dan kemampuannya, menjadikan pihak sekolah harus melakukan penyesuaian terhadap penggunaan kurikulum. Namun kepala sekolah, koordinator tim inklusi, mantan koordinator tim inklusi, GPK, bahkan tim pengembang sekolah megakui tidak adanya kurikulum khusus yang digunakan untuk siswa difabel. Penyesuaian yang dilakukan pihak sekolah khususnya guru mata pelajaran terhadap proses pembelajaran di kelas, belum sampai pada kurikulum tertulis.

1. **Praktik KBM di Sekolah Inklusi**

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMAN 4 Sidoarjo secara tidak langsung mempengaruhi praktik KBM di sekolah. Setiap guru mapel yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo memiliki kegiatan belajar mengajar yang berbeda. Setiap guru mata pelajaran yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo diharuskan untuk membuat perangkat pembelajaran ganda yakni untuk siswa difabel dan siswa non difabel

Pada awalnya penyelenggaraan pihak sekolah berencana untuk melakukan kolaborasi antara GPK dan guru mapel dalam membuat perangkat pembelajaran. Namun pada kenyataannya pembuatan perangkat pembelajaran tersebut dibebankan seluruhnya kepada GPK. Sehingga pihak sekolah melakukan rapat kembali untuk membahas pembagian tanggung jawab dan peran antara GPK dengan guru mapel.

Pembagian tanggung jawab tersebut ditunjukkan melalui disetujuinya peran GPK untuk membuat PPI (Program Pembuatan Individual) yang bersifat non akademik dan guru mapel menangani masalah akademik siswa. Jika dilihat dari sudut pandang Merton adanya pembagian tanggung jawab antara guru mapel tersebut menjadi fungsional, ketika setiap pihak melaksanakan tanggung jawab yang telah dibebankan.

Namun menjadi disfungsional ketika masih terdapat beberapa guru mapel yang tidak memahami perkembangan akademik siswa difabel dan menolak untuk membuat perangkat pembelajaan ganda dengan berbagai alasan. Fungsi manifes dari pembagian tersebut adalah memudahkan dalam hal penilaian terhadap siswa difabel dalam bidang akademik dan non akademik, namun fungsi latennya adalah meringankan tugas GPK yang sebelumnya bertanggung jawab pada seluruh perkembangan siswa baik akademik maupun non akademik.

Inovasi menurut Merton juga ditemui dalam proses pembelajaran di kelas. Jika salah satu tujuan pendidikan inklusif adalah mengintegrasikan siswa difabel dan siswa non difabel tanpa adanya diskriminasi. Maka yang ditemui di lapangan adalah siswa difabel memang berada dalam satu lingkungan belajar dengan siswa non difabel, namun pendidik cenderung memfokuskan pembelajaran kepada siswa non difabel karena ketidakmampuan siswa difabel dalam menerima materi seperti halnya siswa reguler.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Pergerakan dan perubahan yang terjadi di SMAN 4 Sidoarjo berjalan atas pertimbangan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Namun pergerakan dan perubahan tersebut menunjukkan adanya dua sisi yang disebut Merton dengan fungsional dan disfungsional.

Beberapa bentuk disfungsi yang dijumpai pada penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo adalah pembentukan tim inklusi pada awal penyelenggaraan hingga berjalan saat ini tidak memiliki persyaratan khusus, ketidaksesuaian mekanisme penerimaan siswa difabel dalam hal kategori siswa dengan kesiapan sekolah, pelaksanaan KBM yang belum merangkul seluruh siswa difabel, pengalokasian siswa difabel dalam satu kelas yang masih menunjukkan adanya jumlah yang melebihi batas, serta tidak seluruh pendidik melakukan penyesuaian terhadap kurikulum yang digunakan.

Pendidikan inklusif yang terdapat di SMAN 4 Sidoarjo juga menunjukkan beberapa bentuk inovasi yang dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan inklusif. Salah satunya adalah inovasi dalam proses KBM di kelas. Merton menjelaskan bahwa inovasi yang ditemui di SMAN 4 Sidoarjo merupakan bentuk adaptasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan cara yang cenderung dilarang.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMAN 4 Sidoarjo yang masih menunjukkan adanya kekurangan, seharusnya dapat ditingkatkan melalui beberapa hal. Diantaranya adalah kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terdapat di sekolah, baik guru mapel, GPK, tim inklusi, maupun kepala sekolah. Selain itu bantuan dari pihak pemerintah terkait dengan pelaksanaan pendidikan inklusif, juga sangat dibutuhkan baik dalam pelatihan kompetensi bidang pendidikan khusus yang berkelanjutan untuk para pendidik, penyediaan guru pendamping khusus tambahan maupun bantuan dalam sarana dan prasarana penunjang bagi siswa difabel.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alfian. 2013. “Pendidikan Inklusif di Indonesia”. Edu-Bio, Vol. 4. (Diakses pada: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252714&val=6813&title=Pendidikan%20Inklusif%20di%20Indonesia>). 02 Maret 2018

Konpendium Indonesia. Tanpa tahun. “Perjanjian, Hukum, Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif”. (Diakses pada: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001498/149845ind.pdf>). 27 Februari 2018

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Cet. 29. Bandung: PT Remaja Roesdakarya

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa.